

DAMPAK DAN EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Andi Muh. Fadhal Hiqh. T. Pangera¹, Syamsu A. Kamaruddin² & A. Octamaya Tenri Awaru³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar, Jl. A. P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: andi.fadhal123@gmail.com

Article History

Received: 18-04-2025

Revision: 26-05-2025

Accepted: 28-05-2025

Published: 30-05-2025

Abstract. This research aims to analyze the impact, effectiveness, and implementation of social assistance programs in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review method. Data was collected through the search of scientific articles indexed in SINTA and Google Scholar. Data analysis techniques were conducted using content analysis, which involves a deep analysis of the contents of documents and articles to identify patterns, trends, and findings relevant to the focus of the research. The research results show that social assistance has a positive impact in alleviating economic burdens and meeting the basic needs of the community, but it still causes social jealousy and dependency. The effectiveness of the program is considered to be suboptimal due to insufficiently accurate data collection. From the implementation side, the main challenges include distribution, transparency, and coordination. Comprehensive improvements are needed so that social assistance is more targeted and sustainable.

Keywords: Impact of Social Assistance, Effectiveness of Social Assistance, Implementation of Social Assistance

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak, efektivitas, dan implementasi program bantuan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan melalui penelusuran artikel-artikel ilmiah yang terindeks dalam SINTA dan *Google Scholar*. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan *content analysis*, yaitu menganalisis isi dokumen dan artikel secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial berdampak positif dalam meringankan beban ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, namun masih menimbulkan kecemburuan sosial dan ketergantungan. Efektivitas program dinilai belum optimal akibat pendataan yang kurang akurat. Dari sisi implementasi, tantangan utama meliputi distribusi, transparansi, dan koordinasi. Diperlukan perbaikan menyeluruh agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dampak Bantuan Sosial, Efektifitas Bantuan Sosial, Implementasi Bantuan Sosial

How to Cite: Pangera, A. M. F. H. T., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Dampak dan Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (3), 3580-3592. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3171>

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang terus menjadi tantangan utama di Indonesia (Nainggolan et al., 2021; Arifin et al., 2020; Anwar & Wahyuni, 2019). Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program intervensi, angka kemiskinan di berbagai wilayah masih menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan. Masalah ini tidak hanya

mencerminkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, pendidikan, kesehatan, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya. Sebagai negara berkembang, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui sejumlah strategi, salah satunya adalah pelaksanaan program bantuan sosial yang bersifat reguler maupun responsif terhadap situasi darurat, seperti pandemi COVID-19 (Khalif et al., 2024). Program ini dimaksudkan sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Berbagai program bantuan sosial telah diluncurkan oleh pemerintah, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Pratiwi & Imsar, 2022). Masing-masing program memiliki sasaran dan mekanisme tersendiri, namun secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PKH, misalnya, memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga miskin yang memiliki anak sekolah atau anggota keluarga yang memerlukan pelayanan kesehatan. BPNT menyediakan akses terhadap bahan pangan pokok, sementara BLT memberikan bantuan tunai untuk mengatasi kondisi darurat ekonomi. Namun demikian, efektivitas program-program tersebut masih dipertanyakan. Beberapa studi menunjukkan dampak positif berupa peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga, tetapi studi lain menyoroiti persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, ketergantungan terhadap bantuan, serta masalah birokrasi dan distribusi (Sinaga et al., 2022; Salsabila et al., 2024).

Selain aspek ekonomi, bantuan sosial juga berdampak pada dimensi sosial dan psikologis masyarakat penerima (Purnama et al., 2021). Secara sosial, program ini dapat memperkuat solidaritas dan keadilan sosial. Namun, dampak positif tersebut sering kali dibayangi oleh tantangan-tantangan pelaksanaan, seperti ketidakakuratan data penerima, penyaluran yang tidak transparan, dan potensi penyalahgunaan anggaran (Latif & Pangestu, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan bantuan sosial, tidak hanya dari sisi dampaknya, tetapi juga dari proses implementasinya.

Efektivitas bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh akurasi data penerima, mekanisme pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan (Mufida, 2021). Evaluasi terhadap program ini perlu dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan kualitatif yang mampu menggambarkan dinamika sosial dan ekonomi penerima manfaat secara lebih mendalam. Misalnya, bagaimana bantuan memengaruhi perilaku ekonomi rumah tangga, perubahan dalam akses terhadap layanan publik, serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan keberlanjutan program tersebut (Fadhli & Fahimah, 2021).

Di tingkat lokal, pelaksanaan bantuan sosial juga menghadapi berbagai tantangan teknis dan sosial. Distribusi bantuan sering kali terkendala oleh koordinasi antar-lembaga, keterlibatan aparat desa atau kelurahan yang kurang maksimal, serta minimnya transparansi. Selain itu, perlu juga ditelaah sejauh mana program ini mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat atau justru memperkuat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Keberlanjutan program menjadi kunci utama, agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu membawa perubahan jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak, efektivitas, dan implementasi program bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, dengan harapan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana program ini berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan serta tantangan-tantangan yang menyertainya. Temuan dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga dalam merumuskan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan, serta menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas yang dialami masyarakat miskin di lapangan.

METODE

Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik program bantuan sosial di Indonesia. Studi literatur, menurut Yam (2024), merupakan suatu bentuk kajian sistematis terhadap berbagai sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, membandingkan, dan merangkum temuan-temuan dari penelitian sebelumnya guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait dampak, efektivitas, dan implementasi program bantuan sosial.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, khususnya artikel-artikel jurnal yang terindeks di SINTA dan *Google Scholar*. Proses pengumpulan data diawali dengan penetapan tema penelitian berdasarkan relevansi isu, tingkat kebaruan, dan urgensinya dalam konteks sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Tema yang diangkat adalah program bantuan sosial sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.

Selanjutnya, dilakukan pencarian artikel menggunakan tiga kata kunci utama: “dampak bantuan sosial,” “efektivitas bantuan sosial,” dan “implementasi bantuan sosial.” Artikel yang

ditemukan kemudian disaring berdasarkan kriteria relevansi, keterbaruan, dan kualitas publikasi. Artikel terpilih direview secara sistematis dan disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengkaji isi dari artikel-artikel yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada temuan-temuan utama yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi pola, tema, serta perbedaan dan kesamaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Temuan-temuan tersebut kemudian disintesis untuk ditarik kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan bantuan sosial di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Bantuan sosial (bansos) adalah bentuk intervensi pemerintah yang diberikan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bansos bukanlah bentuk kompensasi atas pekerjaan, tetapi lebih kepada upaya perlindungan sosial agar kelompok rentan dapat hidup layak. Dasar hukum bantuan sosial di Indonesia salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyebutkan bahwa bansos bertujuan untuk membantu individu/kelompok yang mengalami masalah sosial agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar (Setiawan, 2017).

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan bersyarat kepada keluarga miskin, dengan syarat anak bersekolah dan anggota keluarga menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Kartu Sembako Bantuan dalam bentuk bahan makanan pokok yang diberikan melalui sistem elektronik. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bantuan dalam bentuk uang tunai, biasanya dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Alam/Sosial Diberikan kepada masyarakat terdampak bencana seperti banjir, gempa, atau konflik sosial. Dari banyak bantuan tersebut konteks yang diteliti adalah dampak bantuan sosial, bagaimana efektivitas bantuan sosial dan problematika implementasi bantuan sosial di Indonesia.

Tabel 1. Hasil temuan literatur

No.	Aspek pembahasan	Hasil Penelitian
1	Dampak Bantuan Sosial	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan dampak positif dari program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat memberikan perlindungan sosial dan meringankan beban hidup keluarga terdampak covid-19. Adapun dampak negatif yaitu mendidik hidup malas, dan rentan konflik (Khoerunisa, et al., 2023)</p> <p>Hasil penelitian menggambarkan uji bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai sangat berpengaruh, maka sudah seharusnya pemerintah kota Padalarang dalam hal ini Pemerintah daerah kabupaten Bandung barat meningkatkan bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai secara tepat, mengingat kelangsungan hidup warga padalarang akibat Pandemi covid 19, akibat tidak memperoleh uang untuk membiayai kehidupan mereka (Pramanik, 2020).</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT covid-19 dapat membantu ekonomi masyarakat, namun menimbulkan dampak sosial berupa terjadinya konflik antar warga dengan pemerintah dusun maupun dengan pemerintah desa (Nafiah & Bharata, 2021)</p>
2	Efektifitas Bantuan Sosial	<p>Hasil penelitian menunjukkan Dalam hal ini titik poin yang menjadi permasalahan dalam program BST dan BLT-Dana Desa di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data. (Khiriyah, et al., 2022)</p> <p>Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan dalam program BST dan BLT-Dana Desa di Desa Gedongarum masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data (Zakiyah, et al., 2020)</p> <p>Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan. Purwosari Kabupaten Pasuruan belum efektif. dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data dan tidak ada bimbingan teknis terkait pendataan. Pembagian bantuan melalui bank himbara juga tidak efektif, karena masih ada yang tidak tepat sasaran (Mufidah, 2021).</p> <p>Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB ini sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar. Apabila dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH tersebut mereka menggunakannya untuk membantu kondisi sosial dan pendidikan anak-anak keluarga miskin (Lutfi, 2019)</p>
3	Implementasi Bantuan Sosial	<p>Hasil penelitian menunjukkan adanya penyalahgunaan bansos dalam implementasinya dan dalam pendistribusian yang kurang maksimal karena informasi masyarakat terhadap pemberian bansos masih sangat rendah, data belum universal. Selain itu pengawasan yang masih kurang memadai juga ikut berperan dalam membukakan pintu terjadinya korupsi (Latif & Pangestu, 2022).</p> <p>Implementasi penyaluran dana peserta Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Talikuran Utara sudah tepat sasaran. Peserta penerima bantuan diberikan kemudahan untuk mengambil bantuan secara langsung di pos penyaluran bantuan yakni PT. POS Indonesia di kecamatan Kawangkoan Utara (Supit & lumingkewas, 2023).</p> <p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan komunikasi pemerintahan dalam implementasi Bantuan Sosial Tunai Kementerian</p>

Sosial belum berjalan dengan efisien sebagaimana yang diharapkan. Pendekatan komunikasi yang dilakukan masih menggunakan komunikasi krisis yang bertujuan mengelola citra dan reputasi. Proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) lebih berfungsi sebagai jaring pengaman sosial masyarakat yang tidak pernah menyelesaikan permasalahan secara tuntas, sehingga dampak positif dari kebijakan tersebut hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek (Gemiharto & Juningsih, 2021).

Dampak Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Indonesia

Pemerintah Indonesia telah lama menerapkan kebijakan bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial (Nugroho & Ruhama, 2021). Bantuan sosial menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat miskin dan rentan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti krisis ekonomi, pandemi, atau bencana alam. Di tengah tantangan sosial-ekonomi yang kompleks, bantuan sosial bukan hanya menjadi alat bantu langsung, tetapi juga diharapkan mampu menjadi pendorong bagi pembangunan manusia secara menyeluruh. Bantuan sosial memiliki peran penting dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka (Wansen, et al, 2023). Dampak langsung dari program ini adalah meningkatnya daya beli masyarakat miskin, sehingga mereka dapat hidup lebih layak dan terhindar dari kelaparan serta kekurangan gizi.

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) selama pandemi Covid-19 di Kelurahan Sikumana memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Sebagian besar penerima bantuan mengaku menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok harian seperti makanan dan kebutuhan rumah tangga. Bantuan ini menjadi solusi jangka pendek yang mampu mengurangi tekanan ekonomi, terutama bagi warga yang kehilangan mata pencaharian akibat pembatasan aktivitas selama pandemi. Beberapa warga bahkan menggunakan sebagian bantuan sebagai modal usaha kecil-kecilan, seperti berjualan makanan atau barang kebutuhan sehari-hari, sehingga membuka peluang pemulihan ekonomi keluarga secara mandiri (Muga, et al., 2021).

Namun, di sisi lain, dampak bantuan ini juga menunjukkan beberapa permasalahan. Salah satu yang paling dominan adalah minimnya efektivitas bantuan dalam jangka panjang. Banyak penerima belum memiliki kemampuan atau pengetahuan yang cukup untuk mengelola bantuan secara produktif. Akibatnya, bantuan hanya digunakan untuk konsumsi sesaat tanpa dampak berkelanjutan terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, terjadi pendobelan data

penerima, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Hal ini menghambat proses verifikasi dan distribusi yang merata serta adil, dan menimbulkan potensi ketidakadilan sosial.

Program bantuan sosial di Desa Cisero memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat selama pandemi Covid-19, seperti memberikan perlindungan sosial, meringankan beban ekonomi, dan membantu pemenuhan kebutuhan pokok (Khoerunisa et al., 2023). Sebagian penerima bahkan memanfaatkan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi dan mempertahankan daya beli. Namun, program ini juga menimbulkan dampak negatif berupa kecemburuan sosial akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran dan munculnya sikap ketergantungan, yang berpotensi melemahkan semangat kerja masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas bantuan sosial perlu diimbangi dengan strategi pemberdayaan seperti edukasi, pelatihan keterampilan, dan penguatan kapasitas agar menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan.

Pada penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) memberikan dampak positif terhadap kelangsungan hidup masyarakat Padalarang, khususnya kelompok menengah ke bawah yang terdampak pandemi. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari dan menjadi penyangga ekonomi keluarga yang kehilangan sumber penghasilan. Dengan adanya bantuan ini, daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah keterbatasan aktivitas ekonomi. Secara statistik, hasil uji regresi menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara bantuan yang diberikan dengan kelangsungan hidup masyarakat. Bantuan langsung tunai memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan bantuan paket sembako, meskipun keduanya terbukti memiliki pengaruh yang positif. Persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah dan ketepatan penyaluran bantuan akan berdampak langsung pada peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat selama krisis (Pramanik, 2020).

Pemberian BLT di Desa Podosoko terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama kelompok miskin dan terdampak langsung oleh pandemi. BLT membantu mereka memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli selama masa krisis, ketika pendapatan mereka menurun drastis akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), berkurangnya aktivitas usaha, atau kesulitan menjual hasil pertanian. Bantuan tunai yang diberikan secara berkala selama enam bulan berperan sebagai penyangga ekonomi rumah tangga, sekaligus mencegah naiknya angka kemiskinan secara drastis di wilayah tersebut. Namun di balik dampak positif secara ekonomi, BLT juga menimbulkan dampak sosial berupa

konflik dan kecemburuan di tengah masyarakat. Munculnya konflik vertikal terjadi ketika warga menilai pemerintah desa tidak adil dalam proses pendataan penerima bantuan. Selain itu, konflik horizontal juga tampak dalam bentuk kecemburuan sosial antara warga yang menerima dan tidak menerima BLT. Pemerintah dusun mencoba meredam potensi konflik ini dengan kebijakan lokal seperti kesepakatan sukarela untuk berbagi sebagian bantuan kepada warga lain yang belum menerima bantuan, sebagai bentuk pemerataan sosial (Nafih & Bharata, 2021).

Dengan demikian, BLT selama pandemi di Desa Podosoko memiliki dampak ganda: satu sisi memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin, dan di sisi lain menimbulkan potensi disintegrasi sosial jika tidak dikelola dengan komunikasi yang terbuka dan transparan. Oleh karena itu, ke depan, selain efektivitas penyaluran bantuan, penting juga untuk memperkuat aspek sosial dengan pendekatan partisipatif dan musyawarah dalam pendataan serta distribusi, agar program bantuan tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial.

Bantuan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun paket sembako selama masa pandemi Covid-19 secara umum memberikan dampak positif terhadap kelangsungan hidup dan kestabilan ekonomi masyarakat miskin di berbagai daerah, seperti Desa Podosoko, Padalarang, Cisero, dan Kelurahan Sikumana. Bantuan tersebut membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, menjaga daya beli, serta menjadi penopang sementara di tengah kehilangan pendapatan. Namun demikian, dampak sosial negatif seperti konflik antarwarga, kecemburuan sosial, dan ketergantungan terhadap bantuan juga muncul akibat penyaluran yang dianggap tidak merata atau tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, agar bantuan sosial tidak hanya menjadi solusi sesaat, perlu ada perbaikan sistem pendataan, transparansi distribusi, serta integrasi program bantuan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Nafiah & Bharata, 2021).

Efektifitas Program Bantuan Sosial Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Program bantuan sosial seperti BLT, PKH, dan BPNT merupakan strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya pada masa krisis seperti pandemi Covid-19. Efektivitas program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran serta keterjangkauan terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Meskipun sebagian besar penyaluran bantuan dinilai tepat waktu dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, masih terdapat persoalan serius terkait ketidaktepatan sasaran dan munculnya kecemburuan sosial. Sebagai respon sementara, beberapa pemerintah desa mencoba menyalurkan bantuan

secara merata untuk meredam konflik sosial, namun langkah ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah distribusi yang tidak merata.

Beberapa studi kasus, seperti di Desa Podosoko, menunjukkan praktik penyaluran bantuan yang lebih efektif karena melibatkan musyawarah desa dan pendataan berbasis DTKS serta survei lapangan. Bantuan yang diterima masyarakat dinilai mampu meningkatkan daya beli dan mengurangi beban ekonomi. Dalam konteks PKH, strategi pendampingan terbukti membantu keluarga penerima manfaat agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan. Bantuan digunakan sesuai tujuan dan disertai dengan edukasi sosial, menjadikan PKH lebih berdampak dalam jangka panjang terhadap perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan.

Namun, secara umum, efektivitas program bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan utama terletak pada pendataan yang tidak akurat, distribusi yang tidak sesuai prosedur, serta penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan tujuan utama program. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh melalui pemutakhiran data penerima, transparansi dalam pelaksanaan, dan penguatan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, bantuan sosial dapat menjadi alat efektif untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan dan mendorong kemandirian masyarakat.

Implementasi Program Bantuan Sosial di Indonesia

Implementasi bantuan sosial (bansos) merupakan bagian penting dari kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan membantu masyarakat rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam pelaksanaannya, program bansos seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah menjangkau jutaan keluarga di berbagai wilayah (Nur, 2021). Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada sistem pendataan, proses distribusi, dan pengawasan di tingkat lokal. Salah satu persoalan utama dalam implementasi bansos adalah persoalan ketepatan sasaran. Meskipun pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan, temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaktepatan, di mana warga yang tergolong mampu justru mendapatkan bantuan (*inclusion error*), sedangkan yang benar-benar miskin tidak terdaftar (*exclusion error*). Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya validasi data dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pendataan.

Proses penyaluran bantuan juga masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah terpencil. Meskipun secara umum bantuan dapat diterima oleh penerima manfaat, beberapa kasus menunjukkan keterlambatan penyaluran akibat kendala administrasi, akses geografis yang sulit, serta kurangnya sosialisasi tentang mekanisme penyaluran. Untuk bansos non-tunai seperti BPNT, keterbatasan agen e-warong dan rendahnya literasi digital masyarakat turut menjadi hambatan. Dalam hal penyaluran Pemerintah daerah belum berhasil menciptakan sistem komunikasi pemerintahan yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, terutama di wilayah Kabupaten Bandung. Ketidaktepatan penyaluran bantuan yang masih terjadi menunjukkan bahwa tujuan utama dari implementasi kebijakan ini yakni menjaga daya beli masyarakat belum sepenuhnya tercapai (Gemiharto & Juningsih, 2021).

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan bansos dinilai belum sepenuhnya terbuka. Masih banyak warga yang tidak mengetahui alasan mereka tidak menerima bantuan, sehingga memunculkan kecemburuan sosial. Selain itu, mekanisme pengaduan belum berjalan secara maksimal, karena warga tidak mengetahui ke mana harus melapor atau merasa enggan karena takut mendapat tekanan dari pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan informasi dan keterbukaan publik dalam setiap tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pendistribusian bansos di lapangan menghadapi banyak kendala, terutama terkait akurasi data penerima, tumpang tindih program, serta lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan. Maraknya praktik penyalahgunaan dan korupsi dalam penyaluran bansos, seperti manipulasi data, pemotongan bantuan oleh oknum pendamping sosial, hingga pemalsuan identitas penerima. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan serta minimnya literasi masyarakat terhadap hak mereka atas bansos (Latif & Pangestu, 2022).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi bantuan sosial di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pendataan, distribusi, hingga transparansi. Untuk itu, diperlukan perbaikan menyeluruh yang mencakup pemutakhiran data secara berkala, peningkatan koordinasi antar-lembaga, penguatan mekanisme pengawasan, serta pengintegrasian bansos dengan program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya menjadi alat bantu sesaat, tetapi juga sarana transformasi menuju kemandirian masyarakat.

Walaupun terdapat kendala tapi pemerintah tetap berusaha untuk melakukan berbagai tindakan untuk memperlancar bantuan sosialnya. Misalnya pada Pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Talikuran Utara telah berjalan dengan tepat sasaran.

Proses dan mekanisme yang diterapkan mengikuti ketentuan resmi dari pemerintah, sehingga warga penerima bantuan dapat memperoleh dana secara langsung di lokasi penyaluran yang telah ditentukan, yaitu PT. POS Indonesia di Kawangkoan. Mereka cukup membawa surat pemberitahuan dan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Skema implementasi ini terbukti memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya bagi warga Kelurahan Talikuran Utara yang terdampak pandemi (Supit & lumingkewas, 2023)

KESIMPULAN

Program bantuan sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif program bantuan sosial adalah memberikan perlindungan sosial, meringankan beban ekonomi, dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sebagian penerima bahkan mampu memanfaatkan dana bantuan untuk memberdayakan diri secara ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya adalah timbulnya kecemburuan sosial akibat penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran serta munculnya sikap ketergantungan terhadap bantuan. Beberapa warga menjadi enggan berusaha secara mandiri karena terlalu mengandalkan bantuan dari pemerintah.

Bantuan sosial dinilai belum efektif sepenuhnya karena tidak mengcover seluruh masyarakat terdampak. Evaluasi dan pembaruan data penerima menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di masa mendatang. Beberapa penelitian berpendapat program bantuan sosial belum berjalan efektif secara menyeluruh. Permasalahan utama terletak pada pendataan yang tidak akurat dan belum diperbarui, menyebabkan munculnya penerima bantuan ganda serta masyarakat miskin yang tidak tersentuh bantuan. Dalam konteks implementasi bantuan sosial di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pendataan, distribusi, hingga transparansi. Untuk itu, diperlukan perbaikan menyeluruh yang mencakup pemutakhiran data secara berkala, peningkatan koordinasi antar-lembaga, penguatan mekanisme pengawasan, serta pengintegrasian bansos dengan program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya menjadi alat bantu sesaat, tetapi juga sarana transformasi menuju kemandirian masyarakat.

REFERENSI

- Anwar, Z., & Wahyuni, W. (2019). Miskin di laut yang kaya: nelayan Indonesia dan kemiskinan. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(1).
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 114-132.
- Fadhli, K., & Fahimah, D. A. N. (2021). Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Bantuan Sosial Covid-19. *Jurnal education and development*, 9(3), 118-124.
- Gemiharto, I., & Juningsih, E. R. (2021). Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 6(1), 1.
- Khalif, A., Hasanah, A. N., Ridwan, M. H., & Sari, B. N. (2024). Klasterisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia menggunakan Algoritma K-Means. *Generation Journal*, 8(1), 54-62.
- Khoerunisa, F., Ansori, A., & Widiastuti, N. (2023). Dampak Program Bantuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Cisero. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 6(2), 174-189.
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *Justisi*, 8(2), 95-107.
- Luthfi, M. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 81-89.
- Mufida, N. U. (2021). Efektivitas bantuan sosial tunai di kelurahan Purwosari kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan. *Jurnal sosial dan sains*, 1(2), 82-92.
- Muga, M. P. L., Kiak, N. T., & Maak, C. S. (2021). Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana–Kota Kupang). *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(2), 105-112.
- Nafiah, I., & Bharata, R. W. (2021). Analisis efektivitas dan dampak pemberian bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(3), 263-277.
- Nainggolan, L. E., Sembiring, L. D., & Nainggolan, N. T. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Berdampak Pada Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Oleh Lora Ekana Nainggolan1. *Lenny Dermawan Sembiring2) & Nana Triapnita Nainggolan3*.
- Nugroho, H., & Ruhama, Z. (2021). Kebijakan Perlindungan Sosial Indonesia pada Situasi Krisis Corona Virus Disease 2019 Indonesia's Social Protection Policy in the 2019 Corona Virus Disease Crisis Situation.
- Nur, A. A. J. (2021). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. *Jurnal ekonomi, sosial & humaniora*, 1(12), 113-120.
- Pratiwi, D. C., & Imsar, I. (2022). Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12).
- Purnama, S., Widayanti, R., Edastama, P., & Panjaitan, A. R. S. (2021). Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Yang Terkena Dampak Ekonomi Selama Covid-19 di Garut. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 67-72.

- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-13.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3).
- Sinaga, E., Lubis, T. A., Situmorang, E. A. O., & Harahap, A. S. (2022). Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatra Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 116-131.
- Supit, B. F., & Lumingewas, E. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Minahasa. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1059-1068.
- Wensen, J., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2023). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol*, 24(3).
- Yam, J. H. (2024). Kajian penelitian: Tinjauan literatur sebagai metode penelitian. *EMPIRE*, 4(1), 61-71.
- Zakiyah, N. M., Oktavia, L., Khairiyah, F., & Ilman, M. A. (2020). Efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 97-110.